

## **Hubungan Implementasi Hukum dengan Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

**Salsabilah Salwa Septiani B1A022239**

**Email: [salsabilawawa19@gmail.com](mailto:salsabilawawa19@gmail.com)**

**Muhammad Armada B1A022255**

**Email: [muhammadarmada52@gmail.com](mailto:muhammadarmada52@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Isu implementasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan permasalahan yang mendasar dalam negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum dapat mempengaruhi pemenuhan HAM di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, serta mencari solusi untuk memperkuat hubungan keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis data sekunder dari literatur hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendukung perlindungan HAM, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang lemah dan akses terbatas terhadap keadilan. Diperlukan reformasi hukum dan penguatan institusi penegak hukum untuk memastikan bahwa HAM dapat dipenuhi secara adil dan merata.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, implementasi hukum, keadilan, penegakan hukum, reformasi

### **ABSTRACT**

*The issue of law implementation and the fulfillment of human rights (HR) is a fundamental problem in any rule of law country. This study aims to analyze how the implementation of laws can affect the fulfillment of HR in Indonesia, identify challenges in its application, and explore solutions to strengthen the relationship between the two. The method used in this research is a juridical-normative approach, with secondary data analysis from legal literature and case studies. The results indicate that while Indonesia has a legal framework supporting HR protection, field implementation still faces various challenges, such as weak law enforcement and limited access to justice. Legal reform and the strengthening of law enforcement institutions are required to ensure that HR can be fulfilled fairly and equitably.*

**Keywords:** human rights, implementation of law, justice, law enforcement, reform

## **PENDAHULUAN**

Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki sistem hukum yang cukup lengkap, pelaksanaan hukumnya masih jauh dari harapan. HAM yang semestinya menjadi hak yang dijamin oleh negara seringkali diabaikan atau dilanggar, baik oleh individu maupun oleh aparaturnya. Dampaknya, banyak masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas, tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan merata.

Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi isu yang krusial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar manusia, pelanggaran HAM tetap sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan oleh aparat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta pelanggaran hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu contoh yang sering diangkat adalah isu kebebasan berpendapat dan berekspresi yang seringkali dibatasi, terutama bagi aktivis dan jurnalis. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat juga sering menyaksikan terjadinya pelanggaran HAM dalam konteks konflik agraria, di mana hak-hak masyarakat adat dan petani sering kali diabaikan oleh negara maupun pihak swasta. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam implementasi hukum terkait pemenuhan HAM di Indonesia.

Dampak dari pelanggaran HAM ini sangat luas dan mendalam, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bagi individu, pelanggaran HAM seringkali mengakibatkan trauma fisik dan psikologis yang sulit disembuhkan. Misalnya, korban kekerasan aparat atau pelanggaran HAM dalam bentuk penangkapan sewenang-wenang dapat mengalami dampak psikologis seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka. Dari sisi sosial, pelanggaran HAM seringkali kali memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Akibatnya, terjadi peningkatan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Masyarakat yang merasa tidak terlindungi oleh

hukum cenderung melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum untuk mengekspresikan kekecewaan mereka, seperti protes dan demonstrasi yang berujung pada kekerasan.<sup>1</sup>

Selain dampak sosial dan psikologis, pelanggaran HAM juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ketidakpastian hukum dan rendahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas tanah dan hak bekerja mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti petani, buruh, dan masyarakat adat. Sebagai contoh, dalam kasus konflik agraria, banyak petani yang kehilangan sumber penghidupannya akibat pengambilalihan lahan secara paksa oleh pihak swasta yang berkolaborasi dengan aparat pemerintah. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang terdampak secara langsung, tetapi juga berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi nasional karena hilangnya kontribusi ekonomi dari sektor-sektor tersebut.

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi HAM. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, secara tegas mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 mengatur berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk memastikan bahwa hukum nasional sejalan dengan standar internasional yang mengatur tentang perlindungan HAM.

Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi hukum dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satu isu utama yang sering dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali tidak menjalankan fungsinya secara profesional dan independen. Banyak kasus pelanggaran HAM yang berakhir tanpa penyelesaian yang adil, atau bahkan tidak diproses sama sekali. Sebagai contoh, kasus pelanggaran HAM berat

---

<sup>1</sup> Munandar, H. Perkembangan konsep hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Global*, 9(2). (2020).

pada tahun 1998 hingga kini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, di mana para korban belum mendapatkan keadilan yang mereka tuntut. Lemahnya penegakan hukum ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti korupsi, tekanan politik, serta minimnya sumber daya untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Selain lemahnya penegakan hukum, akses masyarakat terhadap keadilan juga menjadi isu yang signifikan dalam implementasi hukum terkait pemenuhan HAM. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak. Biaya proses hukum yang tinggi, keterbatasan advokat pro bono, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat dalam hal ini. Akibatnya, hak-hak dasar masyarakat sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari negara.<sup>2</sup>

Isu lain yang tidak kalah penting adalah adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor-aktor kuat seperti pejabat negara atau korporasi besar sering kali tidak diproses secara tuntas karena adanya intervensi politik atau ekonomi yang menghalangi proses hukum yang adil. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum, di mana mereka yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum.

Melihat kondisi ini, jelas bahwa hubungan antara implementasi hukum dan pemenuhan HAM di Indonesia masih jauh dari ideal. Di satu sisi, negara telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Namun, di sisi lain, pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang serius, baik dari segi penegakan hukum, akses keadilan, maupun intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Nugraha, E. Evaluasi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan publik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1). (2023).

Solusi yang dapat diusulkan meliputi reformasi institusi penegak hukum, peningkatan akses keadilan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Reformasi hukum yang bersifat struktural dan substantif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perlindungan HAM. Sementara itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, melalui program-program edukasi dan sosialisasi, juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dapat dihormati dan dipenuhi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Implementasi hukum yang lemah, terutama dalam penegakan hak asasi manusia, berdampak pada ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini memicu berbagai bentuk protes sosial dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara implementasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia guna menemukan solusi atas isu-isu yang ada.<sup>4</sup>

Secara normatif, Indonesia memiliki berbagai landasan hukum yang mendukung pemenuhan HAM, baik yang bersumber dari hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan konvensi-konvensi internasional lainnya. Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan implementasi di lapangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan akses terbatas terhadap keadilan, masih menjadi isu sentral yang harus segera diatasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua pertanyaan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- Mengapa implementasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi hak asasi manusia?

---

<sup>3</sup> Nugraha, E. Evaluasi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan publik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1). (2023).

<sup>4</sup> Rahman, F. (2021). Tantangan implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Keadilan dan Hak Asasi*, 9(2). (2021).

- Bagaimana cara memperbaiki hubungan antara penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia agar lebih efektif?
- Bagaimana Keselarasan antara Hukum Nasional dan Internasional Mempengaruhi Pemenuhan Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum terkait dengan hak asasi manusia serta implementasinya dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait HAM, sementara bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan penelaahan terhadap buku-buku dan literatur terkait, terutama buku "**Penelitian Hukum**" karya **Peter Mahmud Marzuki**. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif dan perbandingan antara peraturan hukum dan penerapannya di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mengapa Implementasi Hukum di Indonesia Tidak Optimal dalam Memenuhi Hak Asasi Manusia?**

Implementasi hukum di Indonesia seringkali tidak optimal dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Salah satu masalah utama adalah lemahnya penegakan hukum yang berakar pada ketidakprofesionalan dan korupsi di kalangan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak konsisten dan terpengaruh oleh kepentingan politik dan ekonomi. Sebagai contoh, banyak kasus pelanggaran HAM, seperti kekerasan oleh aparat atau penangkapan sewenang-wenang, tidak ditangani secara tuntas karena adanya tekanan politik atau suap. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan yang layak, dan pelanggar HAM tidak menerima sanksi yang sesuai.<sup>5</sup>

Implementasi hukum di Indonesia seringkali dianggap tidak optimal dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM). Meskipun negara telah mengakui pentingnya HAM dan berkomitmen untuk memenuhinya melalui berbagai peraturan dan undang-undang, dalam

---

<sup>5</sup> Ningsih, L. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Kajian hukum.

*Jurnal Hukum dan HAM Internasional*, 9(1). (2022).

praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan ketidakefektifan ini mencakup lemahnya penegakan hukum, ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, korupsi, serta pengaruh politik dan ekonomi.

Salah satu masalah utama yang menghambat implementasi hukum dalam memenuhi HAM adalah lemahnya penegakan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum seringkali tidak konsisten dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara tuntas. Misalnya, dalam kasus kekerasan oleh aparat keamanan, banyak kejadian di mana korban tidak mendapatkan keadilan karena adanya upaya untuk menutupi pelanggaran tersebut. Hal ini seringkali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, ketidakprofesionalan di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi salah satu penyebab utama ketidakefektifan implementasi hukum. Banyak anggota kepolisian dan penegak hukum lainnya yang tidak memiliki pelatihan yang memadai terkait HAM, sehingga mereka mungkin tidak memahami pentingnya perlindungan HAM dalam melaksanakan tugas mereka. Ketidaktahuan ini sering mengarah pada tindakan sewenang-wenang, seperti penangkapan tanpa alasan yang jelas atau penggunaan kekuatan berlebihan dalam penegakan hukum.

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor signifikan yang menghambat implementasi hukum yang efektif. Praktik suap dan gratifikasi dalam proses penegakan hukum menciptakan ketidakadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Ketika kasus-kasus pelanggaran HAM ditangani dengan pendekatan yang koruptif, pelanggar tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sementara korban tidak mendapatkan keadilan. Misalnya, jika seorang anggota kepolisian menerima suap untuk menutupi kasus kekerasan, maka pelanggaran tersebut tidak hanya dibiarkan tanpa sanksi, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pengaruh politik dan ekonomi juga berperan penting dalam ketidakefektifan implementasi hukum di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor politik atau bisnis yang memiliki kekuasaan, sehingga penegakan hukum sering kali terhalang oleh kepentingan politik. Kasus-kasus seperti pelanggaran hak kebebasan berekspresi, di mana para aktivis atau jurnalis ditindak secara represif, sering kali terkait dengan upaya untuk

menjaga stabilitas politik atau melindungi kepentingan ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah kadang-kadang lebih memilih untuk melindungi kepentingan tertentu daripada menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Dengan demikian, untuk mencapai implementasi hukum yang optimal dalam memenuhi HAM di Indonesia, diperlukan reformasi yang mendasar. Pertama, penguatan sistem penegakan hukum melalui peningkatan pelatihan dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas agar keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya pengaruh negatif dari praktik korupsi. Terakhir, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penegakan hukum.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi hukum di Indonesia dapat lebih optimal dan mampu memenuhi hak asasi manusia, memberikan keadilan bagi korban pelanggaran, serta memastikan bahwa pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang setimpal.

Korupsi di kalangan penegak hukum menghambat proses peradilan yang adil. Pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk menghindari hukuman, sementara korban tidak memiliki akses yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan pejabat tinggi, proses hukum sering kali terhambat oleh berbagai kepentingan yang menghalangi penegakan hukum yang adil. Sebagai akibatnya, hukum menjadi tidak efektif sebagai alat perlindungan HAM, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun.<sup>6</sup>

Selain itu, ketidakcukupan infrastruktur hukum juga menjadi kendala. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia kekurangan sumber daya baik dari segi finansial maupun personel. Keterbatasan ini mengakibatkan lambatnya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Lembaga-lembaga ini tidak memiliki anggaran yang memadai untuk

---

<sup>6</sup> Arief, B. N. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2018).



melakukan penyelidikan secara menyeluruh atau untuk memberikan pelatihan yang diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, penegakan hukum menjadi tidak efektif, dan pelanggaran HAM terus berlanjut tanpa mendapatkan penyelesaian yang memadai.

## **B. Bagaimana Terbatasnya Akses Keadilan Mempengaruhi Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia?**

Terbatasnya akses keadilan merupakan salah satu isu utama yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Akses keadilan yang terbatas, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak, menghambat upaya pemenuhan HAM. Beberapa faktor utama yang menyebabkan terbatasnya akses keadilan meliputi biaya proses hukum yang tinggi, minimnya advokat pro bono, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Biaya proses hukum yang tinggi menjadi penghalang utama bagi banyak individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal. Proses hukum di Indonesia sering kali memerlukan biaya yang tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak orang yang merasa tidak mampu membayar biaya advokat atau biaya pengadilan, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif. Tanpa bantuan hukum yang memadai, individu yang terancam hak-haknya sering kali tidak memiliki cara untuk melawan pelanggaran yang terjadi.

Minimnya advokat pro bono juga memperburuk masalah ini. Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil, tersedia sangat sedikit advokat yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma. Hal ini mengakibatkan kekurangan dukungan hukum bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi kelompok rentan yang tidak mampu membayar biaya advokat. Sebagai contoh, masyarakat adat yang menghadapi sengketa tanah sering kali tidak memiliki akses ke advokat yang dapat membantu mereka melawan pengambilalihan tanah secara paksa oleh pihak ketiga.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak individu tidak memahami hak-hak mereka atau tidak tahu cara untuk memperjuangkannya. Pendidikan hukum yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan banyak orang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak asasi

manusia dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Kurangnya pengetahuan ini membatasi kemampuan masyarakat untuk menuntut keadilan atau melaporkan pelanggaran HAM yang mereka alami.

### **C. Bagaimana Keselarasan antara Hukum Nasional dan Internasional Mempengaruhi Pemenuhan Hak Asasi Manusia?**

Keselarasan antara hukum nasional dan internasional memainkan peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional seringkali mengalami ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara standar internasional dan praktik hukum nasional yang berdampak pada perlindungan HAM.

Ratifikasi konvensi internasional mengenai HAM menandakan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam hukum nasional sering kali tidak konsisten. Beberapa peraturan nasional mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan internasional, atau implementasinya tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Misalnya, undang-undang yang ada mungkin tidak cukup mencakup perlindungan terhadap hak-hak tertentu, atau peraturan yang ada mungkin tidak diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Ketidaksesuaian ini menyebabkan adanya gap dalam perlindungan HAM. Dalam beberapa kasus, peraturan nasional yang lebih rendah mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen internasional. Sebagai contoh, undang-undang mengenai kebebasan berekspresi mungkin tidak mencakup perlindungan yang cukup terhadap jurnalis dan aktivis, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yang menjamin kebebasan berekspresi. Kesenjangan antara hukum nasional dan internasional ini mengakibatkan perlindungan HAM yang tidak konsisten dan mempengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan oleh negara.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dan internasional. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara

konsisten dengan prinsip-prinsip internasional untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terlindungi dengan baik dan diterapkan secara efektif di lapangan.

Kesimpulannya, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, terbatasnya akses keadilan, dan ketidaksesuaian antara hukum nasional dan internasional. Upaya untuk memperbaiki situasi ini memerlukan pendekatan yang holistik dan reformasi mendalam dalam sistem hukum dan peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

#### **i. Lemahnya Penegakan Hukum dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia**

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum yang tidak konsisten, dipengaruhi oleh korupsi dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, berkontribusi pada kegagalan dalam melindungi hak-hak asasi manusia secara efektif. Kasus-kasus pelanggaran HAM sering kali tidak mendapatkan penanganan yang memadai karena adanya intervensi politik, suap, dan kurangnya sumber daya. Hal ini menyebabkan banyak korban pelanggaran HAM tidak mendapatkan keadilan yang layak, dan pelanggar hukum yang kuat tidak menghadapi konsekuensi yang sesuai. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan signifikan dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

#### **ii. Terbatasnya Akses Keadilan dan Pengaruhnya terhadap Kelompok Rentan**

Terbatasnya akses keadilan di Indonesia merupakan masalah besar yang menghambat pemenuhan HAM, terutama bagi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak. Biaya tinggi dari proses hukum dan minimnya advokat pro bono membatasi kemampuan kelompok ini untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat memperburuk masalah ini, karena banyak individu tidak memahami hak-hak mereka atau tidak tahu cara untuk memperjuangkannya. Terbatasnya akses keadilan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlindungan HAM dan memperbesar kesenjangan dalam penerapan hukum.

Reformasi dalam sistem akses keadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu, terutama yang paling rentan, dapat memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

### **iii. Ketidaksesuaian antara Hukum Nasional dan Internasional**

Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan internasional juga mempengaruhi pemenuhan HAM di Indonesia. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai HAM, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional sering kali tidak selaras. Peraturan nasional yang ada seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan internasional, dan implementasinya di lapangan sering kali tidak efektif. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan dalam perlindungan HAM dan membatasi efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa hukum nasional dan kebijakan yang diterapkan konsisten dengan standar internasional dan bahwa hak asasi manusia terlindungi secara efektif.

## **b. Saran**

### **i. Reformasi Sistem Penegakan Hukum**

Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia, diperlukan reformasi mendalam dalam sistem penegakan hukum. Pertama, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat. Implementasi sistem pelaporan dan penilaian kinerja yang transparan dapat membantu mengurangi korupsi dan memastikan bahwa aparat hukum menjalankan tugas mereka secara adil. Kedua, penting untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan memastikan bahwa mereka bebas dari tekanan politik dan pengaruh eksternal. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa memandang status sosial, politik, atau ekonomi, untuk memastikan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan.

### **ii. Peningkatan Akses Keadilan dan Kesadaran Hukum**

Untuk meningkatkan akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan, perlu adanya upaya untuk mengurangi biaya proses hukum dan meningkatkan ketersediaan advokat pro bono. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan layanan

hukum gratis atau bersubsidi bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya hukum. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas. Pendidikan hukum yang inklusif dan aksesibel dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak mereka dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

### **iii. Keselarasan Hukum Nasional dan Internasional**

Untuk memastikan keselarasan antara hukum nasional dan internasional, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Proses ratifikasi konvensi internasional harus diikuti dengan penyesuaian hukum nasional untuk mencerminkan komitmen internasional. Pemerintah juga harus memastikan bahwa implementasi prinsip-prinsip internasional dilakukan secara konsisten di lapangan. Penerapan standar internasional dalam kebijakan dan praktik hukum nasional dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam perlindungan HAM dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terlindungi secara menyeluruh. Koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil juga penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perlindungan hak asasi manusia.

Kesimpulannya, untuk mengatasi tantangan dalam hubungan antara implementasi hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Reformasi dalam penegakan hukum, peningkatan akses keadilan, dan keselarasan antara hukum nasional dan internasional adalah langkah-langkah krusial untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dipenuhi secara efektif dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. Hak Asasi Manusia di Indonesia: Kebijakan dan Tantangan. Diakses dari <https://www.amnesty.org.id>. (2022)
- Human Rights Watch. Indonesia's Human Rights Challenges. Diakses dari <https://www.hrw.org>. (2022).
- Komnas HAM. (2023). Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>. (2022).
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Tinjauan Kritis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses dari <https://elsam.or.id>. (2022).
- Munandar, H. Perkembangan konsep hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Global*, 9(2). (2020).
- Ningsih, L. Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia: Kajian hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Internasional*, 9(1). (2022).
- Nugraha, E. Evaluasi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam kebijakan publik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1). (2023).
- Purnama, D. Penerapan hukum hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Kemanusiaan*, 8(1). (2019).
- Prasetyo, A. Peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan. *Journal of Legal Studies on Human Rights*, 14(2). (2022).
- Putra, D. K. Tantangan pemenuhan hak asasi manusia di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Internasional dan HAM*, 18(3). (2023).

- Rahmawati, D. Perlindungan hak asasi manusia dalam tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2). (2023).
- Rahman, F. Tantangan implementasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Keadilan dan Hak Asasi*, 9(2). (2021).
- Santoso, R. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia: Perspektif hukum internasional. *Indonesian Journal of Human Rights*, 10(3). (2022).
- Sari, A. P. Kebijakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia di sektor kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 17(2). (2022).
- Soehino, M. *Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (2021).
- Subagyo, A. Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 10(3). (2019).
- Arief, B. N. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2018).
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Perspektif Hukum dan Kewenangan Pemerintah*. Jakarta: Rajawali Pers. (2020).